

**PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR KOTOBARU  
OLEH PEMERINTAHAN NAGARI KOTOBARU  
KECAMATAN X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

**SKRPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Sosial Politik  
FIS UNP Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Administrasi Publik*



**OLEH:**

**FEBRINALDI  
2005/64764**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGERA  
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

## PENGESAHAN LULUS UJIAN SKIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan didepan Tim Penguji Skipsi  
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu 11 Mei 2011 Pukul 11.00 s/d 12.25 WIB

**Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintahan Nagari Kotobaru  
Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar**

Nama : Febrinaldi  
TM/2006 : 2005/64764  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Sosial Politik  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Mei 2011

### **Tim Penguji :**

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Drs. Nurman.S, M.Si	_____
Sekretaris : Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si	_____
Anggota : Drs. Dasman Lanin, M.Pd, Ph.D	_____
Anggota : Afriva Khaidir,SH, M.HUM, MAPA, Ph.D	_____
Anggota : Lince Magriasti, S.IP, M.Si	_____

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang

Prof. Dr. H. Azwar Ananda, MA  
NIP.19610720 198602 1 001

## **HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintahan  
Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

Nama : Febrinaldi

NIM : 2005 / 64764

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 Mei 2011

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Drs. Nurman.S, M.Si  
NIP. 19590409 198503 1 002

Drs. Karjuni Dt Maani, M.Si  
NIP. 196306617 198903 1 003

## ABSTRAK

**Febrinaldi : NIM 2005/ 64764. Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Koto Baru Oleh Pemerintahan Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa fenomena dipasar kotobaru yang tidak sesuai dengan sebagaimana seharusnya yaitu pengelolaan pasar yang baik belum terlihat dilakukan oleh pemerintah Nagari Kotobaru sebagai penanggungjawab utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan pasar koto baru dan kendala apa yang dihadapi dalam pengelolaan pasar Kotobaru tersebut serta upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi-fungsi manajemen oleh para ahli, ditambah dengan beberapa kosep kendala umum yang dihadapi oleh pasar beserta solusi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pasar tradisional dari hasil penelitian KADIN Indonesia dan lembaga penelitian *smeru reseach*

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, informan kunci penelitian ini adalah kepala dinas perdagangan dan pasar kabupaten tanah datar. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi dokumentasi dan wawancara. Tujuannya untuk memperoleh keterangan dan tanggapan tentang permasalahan yang diteliti. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan *member check*. Kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan terhadap data yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan

Pemerintahan Nagari Kotobaru sebagai pemain kunci dalam pengelolaan pasar ini belum melakukan fungsi manajemen dari yang seharusnya dilakukan dalam hal perencanaan, pemerintah Nagari tidak memiliki rencana pengelolaan pasar nagari tersebut kedepan. *Organizing* dalam pengelolaan pasar ini terkesan sangat tradisional, hal ini disebabkan oleh rendahnya sumberdaya yang tersedia dalam pengelolaan pasar ini. Begitu pula mengenai *Actuating* dan *Controlling* yang dilakukan dalam pengelolaan pasar ini. Tidak terdapat sebuah standar yang baku dalam operasionalnya dan tidak terdapat petunjuk manajemen pasar.kurangnya profesionalisme pengurus pasar, kurang tertibnya pedagang dan pengunjung pasar dalam penggunaan pasar tersebut serta kurangnya sarana dan prasarana kebersihan yang dimiliki pasar. Untuk mengatasi kendala tersebut pemerintah Nagari Kotobatu bersama beberapa dinas terkait sudah melakukan koordinasi untuk melakukan pemecahan masalah tersebut dengan dimulainya dibangun jalan dua lajur disebelah timur pasar dan pembangunan terminal pengisian agribisnis. Oleh karena itu, untuk masa yang akan datang diharapkan peran yang lebih aktif oleh Nagari untuk bisa meningkatkan kualitas pengelolaan pasar Kotobaru dengan menyediakan beberapa sarana pendukung dan peningkatan sumberdaya pengurus pasar sekaligus ikut andil dalam pengelolaan sub terminal agribisnis yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

## **KATA PENGANTAR**

Saya merasa sangat bersyukur atas semua rahmat yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa dalam penyelesaian Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memenuhi gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama penulisan skripsi ini peneliti merasa banyak memperoleh bantuan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Azwar Ananda. Selaku Pimpinan Fakultas
2. Bapak Drs. Yasril Yunus, M.Si
3. Bapak Drs. Nurman.S.M,Si dan Bapak Drs Karjuni Dt. Maani,M.si Selaku pembimbing I dan II
4. Bapak. Afriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, Bapak Drs.Dasman Lanin,M.Pd. Ph.D dan Ibu Lince Magriasti, S.IP, M.Si
5. Bapak Andi Asmadi selaku Wali Nagari Kotobaru beserta Bapak A. Dt. Bandaro selaku kepala Pasar Kotobaru juga kepada Bapak Wartis selaku Sekretaris Pengurus Pasar Kotobaru.
6. Bapak Syafril.A,S.Pt Selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Pasar Kabupaten Tanah Datar, dan Bapak Abj Anopa, SE.

Semoga semua amal baik itu diberi balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari materinya maupun penulisan. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan Untuk kesempurnaan dimasa depan beserta harapan agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, April 2011

Penulis.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Lampiran .....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
Bab II Landasan Teoritis .....	9
A. Konsep teoritis .....	9
B. Kerangka Konseptual .....	24
Bab III Metode Penelitian .....	25
A. Jenis Penelitian .....	25
B. Lokasi Penelitian .....	25
C. Informan Penelitian .....	26
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	32
E. Uji Keabsahan Data .....	33
F. Teknik Analisa Data .....	34
Bab IV Temuan Penelitian .....	35
A. Temuan Umum.....	35
B. Temuan Khusus .....	48
C. Pembahasan .....	59
Bab V Penutup .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	63
Daftar Pustaka .....	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus menerus berusaha melakukan perbaikan terhadap pengelolaan seluruh aspek sumberdaya yang dimilikinya, baik berupa sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang tersedia. Pada tataran organisasi publik, indonesia telah berulang kali melakukan perbaikan di internalnya. Terdapat berbagai perubahan tentang tata cara pengelolaan negara, mulai dari amandemen Undang-Undang dasar 1945 kemudian diikuti oleh perubahan Peraturan Perundang-undangan dibawahnya.

Setelah lahirnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tedapat perubahan mendasar dalam pengelolaan Negara Indonesia, baik dalam tataran politis maupun praktis. Tentunya perubahan tersebut dilakukan untuk dapat memenuhi perkembangan yang terjadi seiring perjalanan waktu agar dapat memenuhi pencapaian tujuan Negara yang tercantum dalam UUD 1945.

Penjabaran dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut tentu saja membuat perubahan besar terhadap pengelolaan daerah, karena daerah diberikan tanggung jawab yang sangat besar terhadap kemajuan daerahnya masing masing. Hal ini berarti, Daerah harus mampu menjadi ujung tombak pembangunan Indonesia secara umum. Imbas lain dari perubahan tersebut menuntut Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di daerah harus memiliki kapabilitas yang cukup agar dapat memenuhi tanggung jawab yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang Undangan yang ada. Hampir semua pemerintahan di daerah di Indonesia harus menjadi pelaksana dan mendapatkan pengaruh dari perubahan peraturan



tersebut. Masing-masing pemerintahan daerah mendapatkan porsinya sendiri sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing

Berdasarkan data yang telah dikeluarkan oleh DEPDA GRI yang dikutip dari makalah *plenary and workshop on live bird market / tradisional markets in Indonesia* tahun 2007, di Indonesia saat ini terdapat lebih dari 13.450 pasar tradisional dengan sekitar 12.625.000 pedagang. Jumlah yang cukup banyak ini tentunya memerlukan perhatian yang lebih mendalam untuk menjamin pergerakan perekonomian masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa banyak sekali pihak yang sangat tergantung kebutuhannya terhadap pasar ini, bukan hanya dari kalangan masyarakat umum dengan produsen, akan tetapi juga banyak pelaku usaha yang juga sangat menggantungkan kebutuhan bahan baku industrinya dari pasar tradisional ini.

Mengingat kompleksitas dan banyaknya ketergantungan masyarakat terhadap pasar, maka pasar dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terkelola atau tidaknya sebuah daerah dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketertiban, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan bagi pengunjung serta masalah kelancaran lalu lintas dari dan menuju pasar tersebut. Agar dapat menggerakkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara optimal sudah sepatutnya pasar dikelola dengan baik untuk dapat memberikan dampak yang maksimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu pasar tradisional tersebut yang akan penulis kaji lebih dalam adalah pasar tradisional yang berada di Propinsi Sumatera Barat, yang terletak di Kabupaten Tanah Datar yang bernama Pasar Kotobaru. Pasar Kotobaru ini terletak di kilometer 8 jalan Padang Panjang-Bukittinggi tepatnya di Kecamatan X Koto Kanagarian Kotobaru, berada di sebelah Barat jalan raya. Pasar Kotobaru dapat dikatakan pasar mingguan karena aktifitas jual beli

yang cukup padat hanya terjadi pada setiap hari Senin dan Selasa, pada hari Senin di gunakan sebagai sarana jual-beli sayur-sayuran dan pada hari Selasa digunakan untuk menjual keperluan rumah tangga sehari-hari. Pasar Kotobaru merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Kotabaru dan sekitarnya. Disini pedagang berdatangan dari berbagai daerah untuk mencari kebutuhan akan sayur-sayuran. Keberadaan Pasar Kotabaru memberikan kontribusi yang cukup bagi pendapatan pedagang.

Dalam aktifitasnya pasar Kotobaru kerap menimbulkan efek yang menjadi penghambat roda perekonomian masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Permasalahan utama yang dapat dilihat dengan kasat mata adalah adanya kemacetan panjang di setiap pasar itu digunakan juga terdapat pasar tumpah yang memakan sebagian badan jalan. Sebenarnya sebuah kompleks pasar disebelah Timur pasar Kotobaru tersebut telah selesai dibangun, Namun keberadaannya terlihat tidak dimanfaatkan sama sekali, padahal jika lahan dan bangunan tersebut dipergunakan sebagai prasarana tambahan pasar Kotobaru sekarang baik untuk penyediaan lahan parkir ataupun dalam rangka perluasan kompleks pasar maka akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kesemrautan yang terjadi setiap minggunya.

Selain itu masalah kebersihan dan ketertiban juga menjadi faktor penyebab ketidaknyamanan bagi para pengunjung pasar. Hal itu karena pengelolaan sampah yang masih kurang memadai, dimana sampah tersebut tidak langsung dibersihkan setelah aktifitas pasar tersebut berhenti sehingga hal itu menyebabkan bau yang menyengat dari tumpukan sampah tersebut dan tidak diragukan lagi bahwa itu bisa menjadi tempat perkumpulnya berbagai kuman dan penyakit.

Seharusnya pengelolaan pasar ini sangat diharapkan berjalan baik, sehingga dapat memberikan beberapa manfaat kepada para pedagang dan pembeli khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Manfaat tersebut seperti meningkatkan mobilitas barang dari dan menuju pasar tersebut, Meningkatnya kebersihan dan kenyamanan bagi penggunanya dan meningkatnya kesadaran pengunjung untuk lebih tertib dalam beraktifitas didalamnya. Menurut Wali Nagari Kotobaru, Andi Sutan Mangkuto mengatakan bahwa *“Masyarakat sangat mengharapkan pemerintah Propinsi Sumbar untuk dapat mengatasi permasalahan yang ditimbulkan dari keberadaan pasar Kotobaru”*. Dari pendapat wali nagari tersebut terlihat bahwa di pasar Kotobaru masih banyak terdapat kendala dalam pengelolaan pasar tersebut.

Pemerintah memang sudah mengambil beberapa langkah dalam upaya pengelolaan pasar tersebut agar dapat mendatangkan manfaat yang lebih baik bagi masyarakat, seperti menaungi sebuah tempat terbuka yang digunakan sebagai tempat transaksi jual beli dengan atap genteng, yang bertujuan untuk melindungi para padagang dari hujan dan panas secara langsung, juga penyediaan kantor pengurus pasar. Namun sayangnya langkah pengelolaan yang dilakukan pemerintah tersebut tidak berujung pada penyelesaian permasalahan utama yang terjadi saat ini. Oleh karena itu tentu saja setelah proses pembangunan itu dilakukan permasalahan yang ada saat ini pada pasar tersebut tidak dapat diselesaikan secara komprehensif. Kondisi pasar yang sudah direnovasi tidak memberi pemecahan terhadap permasalahan utama yang terjadi seperti pasar tumpah, kemacetan, kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung pasar.

Kurang tertibnya para pengguna pasar dalam menggelar barang dagangannya di tepi jalan yang terkadang juga memakan badan jalan dalam proses transaksi jual belinya telah

menimbulkan kemacetan di jalan dari dan menuju tempat tersebut. Hal ini diperparah dengan kurang tertibnya pengemudi angkutan umum yang memarkir sembarangan kendaraannya sewaktu proses bongkar muat barang dari dan menuju pasar tersebut. Hal itu dapat berarti kurangnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak terkait atau instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan pasar tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya baiknya pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus pasar Kotobaru dalam menangani masalah pasar tersebut, baik dalam budaya penggunaan pasar tersebut maupun dalam hal teknisnya seperti akomodasi tempat sampah yang memadai dan parkir. Walau kita belum bisa langsung membuat kesimpulan bahwa pengunjunglah yang menjadi penyebab permasalahan ini, Karena dapat kita lihat betapa minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki pasar tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas dapat ditemukan beberapa permasalahan misalnya tentang tata kelola pasar, kurang baik sehingga perlu pengkajian yang lebih dalam, bagaimana **“Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.”**

## **B. Identifikasi masalah, Batasan Masalah dan Rumusan masalah**

### **1. Identifikasi masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah kemukakan diatas, terdapat berbagai permasalahan pengelolaan pasar yang kurang baik antara lain :

- a. Kemacetan yang timbul akibat adanya pasar tumpah di sepanjang jalan dari dan menuju pasar Kotobaru.
- b. Belum maksimalnya Pemanfaatan lokasi disekitar pasar Kotobaru.

- c. Pengelolaan kebersihan dan ketertiban belum terkelola dengan baik sehingga mengganggu kenyamanan dan keindahan pasar Kotobaru.
- d. Pembinaan oleh Dinas terkait Kabupaten Tanah Datar terhadap para pedagang dipasar Kotobaru masih kurang.
- e. Pengelolaan dan tempat parkir pasar Kotobaru yang belum memadai.
- f. Pelaksanaan pengawasan pasar Kotobaru oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar belum optimal.

## 2. Batasan masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yaitu hanya membatasi pada Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

## 3. Rumusan Masalah.

- a. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar?
- b. Apa kendala yang dihadapi Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan pengelolaan Pasar Kotobaru?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi kendala dalam pengelolaan pasar Kotobaru?

### **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan pedoman dan arah melakukan penelitian serta mengetahui secara rinci data yang diperlukan dan relevan dengan penelitian, Maka sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka penelitian ini difokuskan Kepada Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Kotobaru Oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

### **D. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengelolaan Pasar Kotobaru.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Dalam Pengelolaan Pasar Kotobaru.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan pasar Kotobaru.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk perkembangan konsep ilmu administrasi negara, khususnya konsep yang menyangkut sistim pemerintahan daerah, Organisasi dan Manajemen.
2. Secara praktis.

- a. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Nagari dan Pemerintah Kabupaten untuk pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan perannya terhadap pengelolaan pasar-pasar tradisional khususnya pasar Kotobaru ke depan.
- b. Sebagai bahan masukan bagi penelitian lanjutan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan pasar oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto pada khususnya dan pelaksanaan tugas pemerintah Nagari secara umum.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Pasar Tradisional dan Pasar Modern**

Ada beberapa pakar yang menerangkan tentang pengertian pasar ini, salah satunya adalah William J. Stanton, Menurut William J. Stanton yang dikutip dari [www.abdiprojo.blogspot.com](http://www.abdiprojo.blogspot.com) pasar dapat didefinisikan sebagai berikut : Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Sedangkan dalam pembagiannya pasar dapat dilihat dari beberapa spesifikasinya, diantaranya adalah pembagian pasar menurut bentuk, pembagian pasar menurut cara transaksinya dan pembagian pasar menurut jenis barang yang ada didalamnya. Karena penulis hanya memfokuskan penelaahan terhadap pasar tradisional maka penulis hanya merinci pembagian pasar Menurut cara transaksinya. jenis pasar tersebut dibedakan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Berikut penjelasan terhadap konsep pasar tersebut.

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai pengeritan pasar tradisional ini, salah satunya Menurut Suyanto dkk (2006:46), pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual. Selain itu suyanto juga mengkaji mengenai ciri-ciri pasar tradisional. Ciri-Ciri Pasar Traditional : a) Pembeli dan penjual bertemu secara langsung. b) Transaksi terjadi secara langsung. c) Mekanisme transaksi dengan tawar-menawar. d) Menyediakan segala macam barang. e) Untuk pasar tradisional khusus, hanya menyediakan satu jenis barang, Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa



ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain adalah pasar Beringharjo di Jogja, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi serangan dari pasar modern.

Menurut Sinaga (dalam Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM No. 1, 2006) yang dimaksud dengan pasar modern merupakan pasar yang dikelola oleh pemerintah, swasta, maupun koperasi yang manajemennya dikelola secara modern, umumnya terdapat di kawasan perkotaan, sehingga penyedia barang dan jasa memberikan mutu yang baik kepada konsumen. Masyarakat yang berkunjung ke pasar modern umumnya anggota masyarakat kelas menengah ke atas.

Menurut Imam Nurmawan dalam [www.adityapangeran.com](http://www.adityapangeran.com) Pasar modern dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk antara lain :a) Mal/Plaza: tempat atau bangunan (toko) dalam skala besar yang dimiliki atau disewa perorangan, kelompok, pasar, atau koperasi untuk usaha perdagangan berbagai barang dan jasa. Biasanya di sana terdapat sarana rekreasi, restoran, bioskop, dan sebagainya. b) Pertokoan (*shopping center*): wilayah lingkungan pertokoan dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang jalan, yang dapat dijangkau dengan mudah oleh transportasi dan masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan.. c) Pasar Swalayan (*supermarket*): pasar berukuran besar yang menjual bermacam-macam barang langsung kepada konsumen. Ciri khas pasar swalayan adalah teknik pelayanan *self service* atau konsumen melayani diri sendiri.

Prosedur transaksi jual-beli di pasar modern terdiri dari tiga tahap transaksi yang terdiri dari awal, tengah dan akhir. Tahap awal terdiri atas: (1) pembeli memilih barang, (2) penjual menanyakan yang dibutuhkan, (3) penjual memberikan masukan pada pembeli, dan (4) pembeli mulai menanyakan harga awal. Tahap tengah terdiri atas: (1) menemukan barang, dan (2) tawar-menawar harga. Tahap akhir terdiri atas: (1) kesepakatan harga akhir, (2) ucapan terima kasih, dan (3) berpamitan. Sehubungan dengan itu, Damsar (1995:95) menyebutkan tentang pengertian pedagang, menurut beliau pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung ataupun tidak langsung,

Pada bagian lain Damsar (1995:42) juga menyebutkan bahwa Di dalam ekonomi, Pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukannya, yaitu: a) Pedagang Distributor (tunggal) Yaitu pedagang yang mempunyai hak distribusi satu produk dari satu perusahaan tertentu. b) Pedagang Partai besar, Yaitu pedagang yang membeli suatu produk dalam jumlah besar yang dimaksudkan untuk dijual ke pedagang lainnya. c) Pedagang Eceran, Yaitu pedagang yang menjual produk langsung kepada konsumen.

Di Pasar Kotobaru sendiri terdapat ketiga tipe pedagang tersebut, oleh karena itu jalur distribusi hendaknya dapat menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk dapat menjamin suplai ke berbagai tempat dan memperlancar roda perekonomian masyarakat.

## **2. Konsep Pengelolaan Pasar Tradisional.**

Secara umum pengelolaan pasar tradisional di Indonesia telah sering dikaji melalui beberapa penelitian dan sudah sering diterbitkan melalui jurnal-jurnal terkait. Salah satu contohnya adalah jurnal tentang strategi pengembangan pasar tradisional yang dilakukan oleh KADIN Indonesia tahun 2008. Dari dalam jurnal tersebut dapat diambil beberapa konsep tentang

pengelolaan pasar tradisional diantaranya adalah beberapa kendala umum yang biasanya dihadapi oleh pasar-pasar tradisional yang terdapat di Indonesia, yaitu: Kendala Eksternal yang terdiri dari: 1) Permasalahan dan citra negatif pasar tradisional umumnya terjadi akibat kurang disiplinnya pedagang, pengelola pasar yang tidak profesional, dan tidak tegas dalam menerapkan kebijakan atau aturan terkait pengelolaan operasional pasar. 2) Pasar tradisional umumnya memiliki desain yang kurang baik, termasuk minimnya fasilitas penunjang, banyaknya pungutan liar dan berkeliarannya "preman-preman" pasar serta sistem operasional dan prosedur pengelolaannya kurang jelas. 3) Pengaruh globalisasi yang menyebabkan pergeseran perilaku konsumen untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik dipasar modern.

Pada pengelolaan pasar tradisional juga terdapat beberapa kendala yang berasal dari dalam institusi pasar tersebut berikut kendala internalnya adalah: 1) Buruknya manajemen pasar tradisional; 2) Sarana dan prasarana pasar yang sangat minim; 3) Pasar tradisional sebagai sapi perah untuk penerimaan retribusi; 4) Menjamurnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang mengurangi pelanggan pedagang pasar; 5) Minimnya bantuan permodalan yang tersedia bagi pedagang tradisional.

Selain itu lembaga penelitian *Smeru Research Institute* juga pernah menyampaikan bahwa didalam pasar tradisional juga terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan pasar tradisional. Berikut penjelasan tentang hal tersebut. Kendala Eksternalnya adalah; 1) Lingkungan/sosial sekitar pasar mulai banyak berubah; 2) Perubahan gaya hidup konsumen (*lifestyle*) perkotaan ; konsumen ingin mendapatkan pelayanan lebih bukan sekedar membeli barang; 3) Perubahan masa (masa kompetisi dan keterbukaan bukan monopoli), pasar tradisional bukan menjadi satu-satunya pusat perdagangan/ tempat belanja; 4) Mindset pedagang belum

berubah; 5) Globalisasi disadari tetapi belum diantisipasi; 6) Tantangan selalu memberikan peluang, semangat kompetisi dan upaya untuk tetap maju

Faktor Internal yang terdapat dalam pengelolaan pasar tradisional adalah; 1) Pengelolaan yang masih tradisional dan birokrasi; 2) Fisik bangunannya tidak terawat/ umumnya rusak berat; 3) Proses panjang dalam pembangunan pasar (perijinan, kredit kepemilikan kios). Lebih lanjut Prof. Mudradjad Kuncoro sebagai tim ahli bidang ekonomi KADIN Indonesia dalam artikelnya *strategi pengembangan pasar tradisional dan modern* 2008, menyampaikan beberapa pemecahan permasalahan umum tersebut yang bisa ditempuh oleh pengelola atau pemerintah daerah untuk menjadikan pasar tersebut lebih tertata dengan baik agar dapat menopang perkembangan sosial perekonomian masyarakat: 1) Pembangunan dan Rehabilitasi Pasar Tradisional menjadi pasar tradisional yang bersih, aman, dan nyaman; 2) Program pendampingan terhadap pedagang pasar; 3) Pelatihan Pembina dan Pengelola Pasar; 4) Pengaturan dan penyebaran petunjuk manajemen pasar; 5) Penyusunan dan penyebarluasan Pedoman Pengelolaan Pasar; 6) Fasilitas Pos Ukur Ulang (timbang dan takar) serta perlindungan konsumen

Hal senada juga disampaikan oleh DEPDAGRI pada kegiatan *Plenary And Workshop* 2007 dalam makalah *On Live Bird Market / Tradisional Markets In Indonesia*. dalam makalah tersebut menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan pasar tradisional yaitu: a) Perbaikan Infrastruktur Pasar Tradisional, Untuk menarik lebih banyak pelanggan, lingkungan umum dalam pasar tradisional harus ditenahi. 1) Ventilasi dan penerangan yang cukup, fasilitas pembuangan sampah yang memadai bagi pedagang, 2) pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan tingkat kebersihan umum harus dijamin. Peraturan kesehatan dan keamanan harus dapat dipenuhi dan pemantauan berkala untuk melihat kesesuaian

dengan aturan harus dilakukan pemda untuk memulihkan kepercayaan konsumen. 3) Fasilitas parkir yang memadai dan mudah diakses menjadi kebutuhan. Rute transportasi umum hendaknya juga melayani kepentingan pasar tradisional. 4) Rancangan konstruksi pasar bertingkat tidak disukai di kalangan pedagang karena para pelanggan enggan untuk menuju ke lantai atas. Akan tetapi, kondisi pasar yang sudah dibangun bertingkat dapat diperbaiki dengan membangun tangga masuk yang tidak terlalu curam, cukup penerangan, dan tidak terhalangi. Setiap lantai harusnya secara khusus menjual jenis barang-barang tertentu saja sehingga akan mendorong arus pelanggan ke lantai-lantai lainnya.

b) Pengorganisasian Para PKL, Pengorganisasian para PKL dengan menegakkan aturan larangan bagi PKL untuk membuka lapak jualan di sekitar pasar tradisional dan memindahkan mereka ke dalam kios-kios yang ada di dalam bangunan pasar tradisional perlu dilakukan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang signifikan pada tingkat perdagangan di pasar tradisional. Hal ini juga akan menjamin sistem yang lebih adil, yakni semua pedagang tunduk pada peraturan dan retribusi yang sama. Selain itu, para pembeli akan masuk ke dalam bangunan pasar untuk berbelanja.

c) Penyediaan Dukungan bagi Pedagang Tradisional. Kegiatan tersebut berupa; 1) Pengkajian terhadap pilihan asuransi usaha, Pemda hendaknya menyediakan dukungan bagi upaya kajian terhadap pilihan asuransi usaha bagi pedagang tradisional untuk melindungi mereka bila terjadi kerugian pada penyediaan stok dan aset yang dimiliki. Pilihan yang diambil harus dapat dengan mudah diakses dan sesuai dengan kemampuan pedagang pasar tradisional. Informasi mengenai asuransi dan proses perlindungan yang diberikan asuransi terhadap setiap kerugian yang dialami hendaknya juga disosialisasikan di pasar-pasar tradisional. 2) Bantuan modal bagi pedagang tradisional, Saat ini beberapa bank menawarkan pinjaman kepada

pedagang, namun bunga dan syarat yang ditetapkan menyulitkan para pedagang tradisional untuk mengakses pinjaman. Pemda, melalui dinas pasar, seharusnya menjamin bahwa para pedagang dapat memiliki akses bagi pilihan pinjaman keuangan mikro sehingga mereka dapat melakukan pengembangan usaha.

d) Regulasi Terperinci untuk Pasar Modern, Pemerintah Pusat dan pemda harus memiliki mekanisme kontrol dan sistem pemantauan yang diterapkan untuk menjamin persaingan yang adil antara pedagang pasar modern dan pasar tradisional. Regulasi bagi pasar modern hendaknya mencakup isu-isu seperti hak dan tanggung jawab pengelola pasar modern dan pemda, dan juga sanksi terhadap pelanggaran aturan. Beberapa pemda mungkin menganggap perlu untuk memiliki peraturan khusus yang terpisah, namun perbaikan atas peraturan yang ada saat ini seharusnya sudah memadai.

### **3. Sosiologi Masyarakat Minang**

Menurut Nizarwan dalam [rantaunet.com](http://rantaunet.com), Masyarakat minang berbeda dengan banyak masyarakat tradisional di Nusantara ini, masyarakat dan kebudayaan Minangkabau memiliki filosofi dan pandangan hidup (Weltanschauung) yang sesungguhnya mengandung nilai-nilai global yang langgeng, "tak lekang oleh panas dan tak lapuk oleh hujan." Melalui pepatah-petitih dan pantun-peribahasa itu, orang akan menemukan sejumlah prinsip dasar kehidupan yang padanannya hanya ditemukan dalam kebudayaan Yunani lama dan dalam khazanah dan kebudayaan Islam. Kebetulan ketiganya adat Minangkabau, kebudayaan Barat yang Yunani (melalui pengaruh modernisme dari Barat), dan Islam dalam prosesnya telah terjalin dalam satu jalinan ajaran yang harmonis dalam kebudayaan Minangkabau. Dengan pendekatan dialektik

tesis-antitesis dan sintesisnya, masyarakat dan kebudayaan Minangkabau telah memadu ketiga unsur budaya itu, seperti yang dipusakakan oleh masyarakat di sana saat ini.

Dalam tulisannya tersebut (rantaunet.com) Nizarwan juga berpendapat bahwa sejumlah ciri budaya yang lekat dengan nama Minangkabau adalah: demokratis, terbuka, resiprokal (timbang-balik), egaliter, sentrifugal, kompetitif, kooperatif, dan mengakomodasi konflik. Setelah itu meletakkan "Nan Bana" (yang benar) sebagai raja dan hukum tertinggi. Raja yang sesungguhnya dalam kebudayaan Minangkabau bukanlah orang, melainkan "hukum yang benar" itu -- suatu hukum yang di atasnya tak lain adalah Kitabullah (Alquran). Ini jika dikaitkan dengan perlambang utama kebudayaan Minangkabau yang telah Islami: "Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah." Seperti diungkapkan, dalam tatanan masyarakat dan kebudayaan Minangkabau dikatakan: Kamanakan barajo ka mamak Mamak barajo ka panghulu Panghulu barajo ka mufakat Mufakat barajo ka nan bana Nan bana badiri sandirinyo. Tatanan dan struktur sosialnya bisa berubah dari masa ke masa, tapi prinsipnya tetap dan langgeng. Kemenakan bisa berarti "warga negara" dalam artian sekarang, tapi bukan "kawula". Dia adalah manusia yang merdeka dan bebas menentukan banyak pilihan terbaik untuk dirinya sendiri. Tapi dia beraja ke penghulu, yang berarti pemimpinannya yang secara kelembagaan bisa pula berjenjang naik bertanggung turun dari atas sampai ke bawah. Hanya saja, pemimpin ini mesti beraja kepada mufakat, dan di atas semua itu, beraja kepada yang benar. Yang benar ini adalah "hukum" dan "ketentuan-ketentuan" yang mengatur segala segi kehidupan dalam masyarakat. *Nan bana* yang berdiri sendirinya" itu adalah sebuah ungkapan budaya Minangkabau yang sangat jitu dan mendasar sekali. Ungkapan ini hanya bisa ditemukan padanannya dalam ajaran Islam dan filsafat Yunani itu. Supremasi hukum yang diletakkan atas dasar kebenaran bukan orang ini adalah "kontribusi budaya" yang bisa disumbangkan oleh masyarakat dan kebudayaan Minangkabau

kepada masyarakat dunia,. Mata rantainya adalah: (1) kemenakan (warga negara) yang bebas merdeka; (2) penghulu (pemimpin) yang arif bijaksana, dan mendasarkan semua kearifbijaksanaannya itu kepada kata mufakat; dan (3) "nan benar" (hukum, undang-undang) yang berdiri sendirinya, dan berdiri di atas segala kepentingannya. Karena para kemenakan, yang adalah warga dan para penghulu sekaligus pemimpin, itu adalah manusia-manusia yang bebas dan merdeka, kata mufakat melalui proses musyawarah dengan cara baio-batido (beria-bertidak: mutual deliberations), yang mengutamakan kepentingan bersama di atas yang lainnya, adalah tuntutan logisnya. Yang dituntut dengan sendirinya adalah prinsip demokrasi atas dasar "duduk sama rendah tegak sama tinggi" di antara sesama dalam menyelesaikan semua persoalan, dengan semangat musyawarah: "tiada kusut yang tidak terselesaikan dan tiada keruh yang tidak tejernihkan." Proses musyawarah berjalan menurut jalur "alur dan patut" dengan tujuan: "bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat."

Rudolf Mrazek, seorang sosiolog Belanda (dalam Wikipedia.org), menyampaikan bahwa terdapat dua tipologi budaya Minang, yakni dinamisme dan anti-parokialisme melahirkan jiwa merdeka, kosmopolitan, egaliter, dan berpandangan luas, hal ini menyebabkan tertanamnya budaya merantau pada masyarakat Minangkabau.

Selanjutnya Nizarwan dalam rantaunet.com mengatakan bahwa betapapun, prinsip berposisi untuk berposisi dan dominasi mayoritas atas minoritas dengan pertimbangan kekuasaan tidaklah dikenal ataupun dibenarkan. Beraja kepada yang benar memungkinkan suara seseorang atau sekelompok kecil orang yang berdiri di atas kebenaran diterima oleh kelompok yang lebih besar. Demokrasi Minangkabau, karena itu, adalah demokrasi yang meletakkan kekuasaan (kedaulatan) pada rakyat atas dasar menegakkan kebenaran itu. Demokrasi egaliter dengan duduk sama rendah tegak sama tinggi ini diperkuat lagi dengan sifat-sifat hubungan yang



terbuka, kompetitif, koperatif dan resiprokal, dengan prinsip: *lamak di awak katuju di urang* (disukai oleh kedua belah pihak; "win-win cooperation"). Prinsip yang sama adalah menerima perbedaan pendapat dan mengakomodasi konflik. Semua ini diungkapkan dalam adagium-adagium adat dalam bentuk pantun-pribahasa, pepatah dan petiti.

Adat dan kebudayaan Minangkabau pun menerima prinsip-prinsip pembaruan dengan orientasi: *change and stability*. Yang tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan itu adalah filosofi dasar dan prinsip-prinsip dasar, yang kalau "dibubut layu, diasak mati." Seperti prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan di atas, tanpa itu dia tidak bernama Minangkabau lagi. Ini yang dinamakan dengan: "Adat nan sebenar adat." Selain itu, prinsipnya adalah: "Sekali air gedang sekali tepian berubah." Termasuk ke dalamnya adalah ketiga kategori adat lainnya, masing-masing "Adat nan diadatkan," "adat-istiadat" dan "adat nan teradat." Keempat adat itu berjejer dalam satu garis kontinum, dari yang sama sekali tidak bisa berubah menuju ke yang setiap kali bisa berubah sesuai dengan tuntutan masa dan berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

#### **4. Konsep Manajemen**

Miller dalam Malayu (1992:6) mendefinisikan Manajemen sebagai suatu proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisir dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sedangkan Menurut Ordway Tead dalam Inu Kencana (1999:50) Manajemen adalah suatu proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan manajemen itu adalah suatu kegiatan organisasi sebagai suatu usaha dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang mereka taati sedemikian rupa sehingga diharapkan hasil yang dicapai sempurna, yaitu efektif dan efisien. Dengan demikian

manajemen melibatkan berbagai elemen organisasi baik internal, eksternal, saran prasarana, alat, barang maupun fungsi dan kedudukan (Jabatan) dalam organisasi yang diatur sedemikian rupa dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam gerak organisasi, manajemen mempunyai peranan yang penting. Jika dilihat dari segi aliran fungsi dalam organisasi, manajemen berperan setelah ditetapkan kesepakatan antara 2 orang atau lebih untuk bekerjasama dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disepakati, kemudian maka dibentuklah kesepakatan dalam bentuk perserikatan kerjasama (organisasi). Agar dalam organisasi tersebut dapat bekerja secara efektif dan efisien maka dibuatlah cara-cara kerja organisasi yang disebut manajemen. Dalam melaksanakan manajemen akan memberikan manfaat bagi organisasi, tim dan individu. Manajemen mendukung tujuan menyeluruh organisasi dengan mengaitkan pekerjaan dan setiap pekerja dan manager pada keseluruhan unit kerjanya. Pekerja memainkan peran kunci atas keberhasilan organisasi. Seberapa baik seorang pemimpin mengelola kinerja bawahan akan berlangsung mempengaruhi kinerja individu, unit kerja, dan seluruh organisasi.

Over (1987;71) pernah menyampaikan bahwa manajemen publik tidak lain adalah manajemen instansi publik atau instansi pemerintahan. Manajemen publik bukanlah scientific manajemen meskipun sangat dipengaruhi oleh scientific manajemen. Manajemen publik juga bukanlah *policy analisis* bukan adminsrasi publik yang baru atau kerangka yang lebih baru. Manajemen publik mereflksikan antara orientasi rasional instrumental pada satu pihak dan pada pihak lain berorientasi pada politik kebijakan. Manajemen publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti ; planning, organizing, actuating dan controlling dengan SDM, keuangan, fisik dan politik.

#### a. Fungsi Manajemen

Banyak ahli yang menerangkan tentang fungsi manajemen ini. Tapi penulis hanya memaparkan fungsi manajemen menurut George R Terry dalam Manulang (1963:81) yaitu.:

##### 1) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecendrungan-kecendrungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi perencanaan (a) menetapkan tujuan dan target bisnis (b). Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target yang ingin dicapai (c) menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. (d) menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target yang diharapkan.

Didalam widjaya (1987:14) juga terdapat penjelasan bahwa, Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses yang secara sistematis mempersiapkan kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Didalam perencanaan terdapat beberapa proses yang perlu diketahui, yaitu sebagai berikut: a)Permasalahan yang terkait dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. b) Cara mencapai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. c) Penerjemahan rencana kedalam program-program kegiatan yang kongkrit. d) Penetapan jangka waktu yang dapat disediakan guna mencapai tujuan dan sasaran.

Widjaya di dalam buku pengantar manajemennya (1987;12)juga memiliki pendapat bahwa perencanaan yang baik memiliki beberapa kriteria yang harus dimilikinya, suatu rencana dapat dikatakan baik, apabila memenuhi syarat berikut: a) Jelas dan dapat dimengerti serta dapat menjawab pertanyaan: apa yang direncanakan, perencanaan yang mana, dengan cara apa, kapan, kapan, dan bagaimana. b)Pragmatis, yaitu disertai perhitungan konkrit berdasarkan asumsi yang

logis.c)Operasional, yaitu dapat dilaksanakan. d) Ambisius tapi tetap realistis.d)Berlangsung dalam tahapan waktu yang konsisten. e) Fleksibel, yaitu dapat disesuaikan dengan perubahan yang mungkin terjadi dimasa depan. f)Memiliki skala prioritas.

## 2) Fungsi Pengorganisasian (*Organizing*)

Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja dengan efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan dalam fungsi pengorganisasian a) mengalokasi sumber daya, b)merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. c) kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia/ tenaga kerja. d) kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat.

Organizing (pengorganisasian kerja) dimaksudkan juga sebagai pengaturan atas suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dipimpin oleh pimpinan kelompok dalam suatu wadah organisasi. Wadah organisasi ini menggambarkan hubungan-hubungan struktural dan fungsional yang diperlukan untuk menyalurkan tanggung jawab, sumber daya maupun data.

## 3) Fungsi Pelaksanaan (*Actuating*)

*Actuating* diartikan sebagai fungsi manajemen untuk menggerakkan orang yang tergabung dalam organisasi agar melakukan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam planning. Pada tahap ini diperlukan kemampuan pimpinan kelompok untuk menggerakkan; mengarahkan; dan memberikan motivasi kepada anggota kelompoknya untuk secara bersama-sama

memberikan kontribusi dalam menyelesaikan manajemen proyek mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### 4) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian (*Controlling*)

Didalam bukunya pengantar manajemen (1989:73) Mansoer menyatakan bahwa, pengawasan adalah Proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan organisasi yang dihadapi. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian a) mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target organisasi sesuai dengan indicator yang telah ditetapkan b) mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan c) melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target organisasi.

*Controlling* diartikan sebagai kegiatan guna menjamin pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. untuk memastikan masing-masing staf sudah melakukan tugasnya dalam koridor “*Quality Assurance*”. Sehingga, tahap-tahap pencapaian sasaran sebagaimana direncanakan dapat dipenuhi.

Ruang lingkup kegiatan *controlling* mencakup pengawasan atas seluruh aspek pelaksanaan rencana, antara lain adalah: Produk pekerjaan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Seluruh sumber-sumber daya yang digunakan (manusia, uang , peralatan, bahan), Prosedur dan cara kerjanya, Kebijaksanaan teknis yang diambil selama proses pencapaian sasaran.

## **5. Aspek Penggunaan Ruang Dalam Pengelolaan Pasar.**

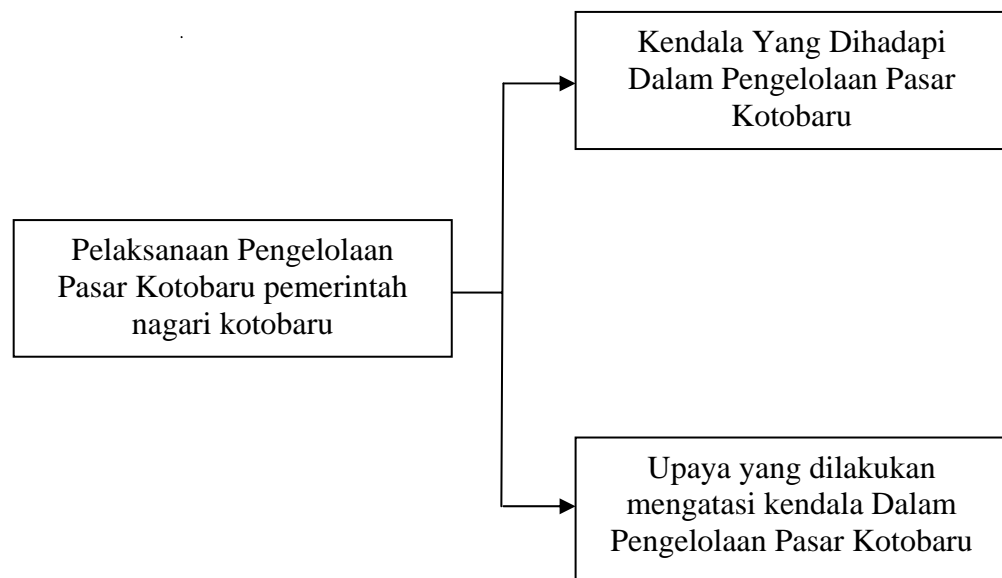
Menurut Damsar (1995; 98) Pendistribudian barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain adalah inti dari perdagangan. Jika dibandingkan antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya pemanfaatan ruangnya memang ada perberbedaan akan tetapi dalam prinsip semuanya sama. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan struktur social budaya, teknologi dan pengetahuan. sebagai contoh, seorang pedagang kaki lima akan memilih lokasi strategis berdasarkan naluri dagang. Mereka cenderung mencari tempat kearamaian yang dilalui oleh banyak orang. Namun bagi pedagang kelas menengah, untuk mencari lokasi yang strategis biasanya berkonsultasi kepada konsultan bisnis atau membuat tim untuk melakukan survey sendiri.

Dalam hal pemanfaatan ruang, lokal pasar tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi bagi penjual dan pembeli tetapi ia juga dapat mengemban fungsi komunikasi dan rekreasi. Bagi beberapa pasar tertentu fungsi rekreasi dan komunikasi dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga ia dijadikan senjata dalam persaingan. Misalnya membuka ruang hijau yang asri, sarana bermain anak dan lain-lain. Damsar juga mengatakan bahwa ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menjadikan sebuah ruang atau komplek pasar menjadi tempat yang strategis yaitu; a) dengan mempercantik ruangan itu sendiri, mulai dari mewarnai bangunan hingga menambah pernak pernik bangunan b) membuat suatu kondisi yang membuat orang betah untuk beerlama-lama di tempat tersebut dan ingin kembali lagi dilain waktu ketempat tersebut. Untuk memperoleh ruang yang strategis para actor ekonomi merujuk pada letak dari ruang yang akan dijadikan tempat kegiatan ekonomi. Adapun tempat-tempat yang dianggap strategis adalah: a) dilalui jalur kendaraan. b) dekat dengan daerah penghasil. c) dekat dengan daerah pemukiman penduduk.

## B. Kerangka Konseptual

Dengan permasalahan yang kerap kali terjadi dipasar Kotobaru tersebut sudah selayaknya penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut. Beranjak dari tugas pemerintah nagari yang di cantumkan didalam peraturan bupati tanah datar nomor 11 tahun 2010 dan dengan melakukan analisis menggunakan konsep manajemen pengelolaan pasar yang telah diteliti oleh *Smeru Reseach Institute* penelitian KADIN dan , Untuk mengukur hal tersebut penulis akan menganalisis bagaimana pelaksanaan pengelolaan pasar Kotobaru oleh Pemerintah Nagari Kotobaru Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang dijalkannya. Agar dapat mencari sumber permasalahan yang sedang terjadi maka penulis membuat Kerangka konseptual tersebut sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pemerintah Nagari Kotobaru memiliki peranan penting dalam mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di pasar kotobaru ini. Karena pasar koto baru merupakan pasar dengan tipe “A”, artinya pasar ini berada dibawah Nagari,dimiliki oleh Nagari dan pengelolaanya sepenuhnya diatur oleh Nagari.

1. Dari hasil wawancara, pengamatan dan studi dokumentasi yang penulis lakukan, proses manajemen pasar kotobaru belum bisa di anggap memiliki manajemen yang baik, hal itu karena belum adanya sebuah organisasi ataupun manajer yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi manajemen ini. Disamping itu Pemerintahan Nagari belum memiliki perencanaan kedepan dalam pengelolaannya. dalam organizing pengelolaan pasar kotobaru masih sangat tradisonal karena tidak memilki standar kegiatan, rekrutmen, pelatihan kepada pegawai apalagi kegiatan pengembangan SDM yang lainnya.Begitu pula mengenai peaksanaan fungsi *Acatuating* dan *Controlling* dari pengamatan, wawancara dasn studi dokumentasi yang penulis lakukan, tidak terdapat sebuah aturan, target dan standar operasional pasar.
2. Dari hasil kajian diatas peneliti menemukan beberapa kendala yang dihadapi yaitu, bahwa profesionalime pengurus pasar yang masih belum memadai untuk dapat melakukan proses manajemen yang baik, Selain itu peneliti juga menemukan bahwa belum adanya petunjuk manajemen pasar untuk memastikan kelancaran kegiatan dipasar kotobaru Hal ini menjadi penting karena tidak menutup kemungkinan akan menjadi masalah yang berlarut-larut jika tidak ada aturan yang jelas. Tidak adanya pos ukur yang difasilitasi oleh pengurus pasar juga menjadi sallah sati temuan dalam penelitian ini,



fasilitas ini sangat dibutuhkan untuk menjamin netralitas dan mencegah terjadinya kesalahpahaman antar pedagang dan pembeli serta ini dapat meningkatkan pendapatan pengurus pasar. Tidak adanya program pendampingan terhadap pedagang, untuk memaksimalkan penjualan hasil pertanian di daerah setempat. Hal itu dibutuhkan mengingat pengelolaan bisnis untuk skala yang lebih luas. Belum maksimalnya dampak koordinasi dengan departemen Pekerjaan Umum Sumatera Barat pembangunan jalan 2 lajur di sebelah timur pasar tersebut. Hal tersebut merupakan solusi yang sangat efektif dalam mengurangi kemacetan yang saat ini terjadi. Begitu pula dengan keberadaan sub terminal yang agribisnis yang dikelola oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan kabupaten tanah datar yang belum diaktifkan penggunaannya. Kurangnya sarana kebersihan, untuk area pasar seluas 2/3 hektar dibutuhkan lebih dari satu bak sampah, sejalan dengan itu kebutuhan akan pengangkutan sampah yang cepat menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan di pasar tersebut.

3. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi kendala tersebut dengan melakukan pembangunan kantor pengurus pasar, melakukan koordinasi dengan pihak berwajib dalam pengamanan aktivitas yang terjadi di pasar kotobaru, menyediakan dan menata lahan parkir kendaraan serta membangun atap pelindung bagi pedagang. Di sisi lain pengurus pasar telah mengkoordinasikan dengan PT.ASKES untuk menyediakan bak sampah dan juga mengkoordinasikan beberapa pekerja lepas untuk melakukan pembersihan sampah setelah aktivitasnya.

## B. Saran

Dari hasil kajian di atas dapat diambil beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Nagari Kotobaru adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang baik untuk bisa meningkatkan kualitas pengelolaan pasar kotobaru.
2. Melibatkan pemerintahan Nagari dalam aktivasi subterminal agribisnis yang belum digunakan, dalam hal ini sangat diharapkan pemerintah kabupaten agar rela membagi manajemen pengelolaanya dengan Nagari Kotobaru
3. Mengingat rendahnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh masyarakat nagari disarankan kepada Pemda untuk mengkoordinasikan Balai Diklat untuk memberikan pelatihan kepada pengurus pasar. Hal ini ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan nagari dan peningkatan pendapatan pedagang di pasar tersebut.
4. Dari pembahasan di atas dibutuhkan peningkatan sarana prasarana seperti kelengkapan alat-alat kantor pengurus pasar dan perbaikan beberapa bagian atap yang bocor.
5. Selain itu koordinasi akan pentingnya aktifitas sub Terminal Agribisnis (SPA) juga sangat penting dilakukan. Hal itu mengingat dengan diaktifkannya terminal tersebut maka akan mengurangi kemacetan dan juga bisa berdampak terhadap peningkatan hasil bumi petani di daerah sekitar. Jika TPA tersebut berhasil mengeksport barang dan luar maka itu bisa mendongkrak harga komoditi pertanian yang menguntungkan petani.
6. Pedagang Kaki Lima dapat dianggap sebagai penyebab kurangnya pelanggan akan tetapi apa bila tidak ada PKL yang berjualan di sana hal itu dapat menimbulkan masalah lain.

Karena tidak ada lagi tempat membeli minum murah meriah di pasar tersebut ditambah sewaktu cuaca sangat panas maka hal itu menjadi serius.

7. Dari wawancara dengan pedagang yang bersangkutan mengatakan bahwa pedagang mengaku kekurangan modal dalam ekspansi bisnis ke luar negeri dan merasa kalah dalam SDM oleh sebab itu diharapkan Pemda melakukan koordinasi yang lebih terhadap pembiayaan permodalan bagi pedagang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Aw.Wijaya.1987 *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*: Jakarta. Bina Aksara
- \_\_\_\_\_.1987 *Pengantar Manajemen*: Jakarta. Bina Aksara
- Benyamin liputo. 1989. *Pengantar Manajemen*: Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Press.
- Damsar, 1995. *Sosiologi Ekonomi*.jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Inu Kencana Syafie. 1997. *Ilmu Administrasi Public*. Jakarta ; Rineka Cipta.
- Lexy J. Moleong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manulang. 1963. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Jakarta.
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sapinah Faisal. 2005. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2006. *Pasar Tradisional dan Pengelolaannya*. Jakarta :Erlangga.

### **Jurnal**

- Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pasar Modern
- Jurnal Kamar Dagang dan Industri No 6 Tahun 2008 Tentang Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisional

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.